

SKRIPSI

**PENGARUH KINERJA FISKAL TERHADAP
KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh :

FADEL RIZALDI

NIM. 180604147

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi
Dengan Judul:

Pengaruh Kinerja Fiskal Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

Disusun Oleh:

Fadel Rizaldi
NIM : 180604147

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi
pada Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si.
NIP. 19720428281999031009

Pembimbing II,

Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.I., M.Sc.
NIP. 198803192019032013

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Isnuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si.
NIP. 198601282019031055

**PENGARUH KINERJA FISKAL TERHADAP KEMISKINAN
DI PROVINSI ACEH
(Studi Terhadap Masyarakat Desa Lampanah Kecamatan Indrapuri
Kabupaten Aceh Besar)**

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Sekretaris

R. Meutia
Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.I., M.Sc.
NIP. 198803192019032013

Penguji II

Uliya Azra, M.Si.
NIP. 199410022022032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
JUN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP 198006252009011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fadel Rizaldi
NIM : 180604147
Fakultas/Jurusan : Ekoomi dan Bisnis Islam
E-mail : 180604147@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐
yang berjudul :

Pengaruh Kinerja Fiskal Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

beseita perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

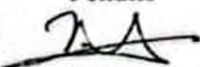
Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 6 Mei 2025

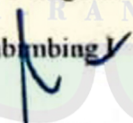
Mengetahui:

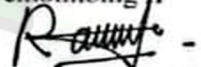
Pembimbing I

Pembimbing II

Penulis


Fadel Rizaldi


Dr. Muhammad Adnan, S.E.,
M.Si.


Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.I.,
M.Sc.

NIM. 180604147

NIP. 19720428281999031009

NIP. 198803192019032013

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fadel Rizaldi

NIM : 180604147

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 16 Januari 2025
Yang Menyatakan


Fadel Rizaldi

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kinerja Fiskal Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh”.

Makalah proposal ini disusun dengan maksud guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Mata Kuliah Seminar Ekonomi Pembangunan di Program Studi Ilmu Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Cut Dian Fitria, SE., M.Si., Ak, CA, selaku Ketua program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Ana Fitria SE.,M.Sc Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Kepada Bapak Hafizh Maulana, SP., S.HI., M.E selaku ketua laboratorium Fakultas Eknomi dan Bisnis Islam Ar- Raniry Banda Aceh.

4. Kepada Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.I., M.Sc. selaku dosen pembimbing II. Yang telah menyumbangkan waktu serta ilmu pengetahuan selama proses bimbingan sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ana Fitria SE.,M.Sc selaku dosen pembimbing akademik dan seluruh staff pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry.
6. Kepada Keluarga besar saya yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, waktu dan doa serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga.

Akhir kata, semoga Allah SWT melimpahkan perlindungan dan kebaikan sebagai balasan atas kebaikan semua pihak kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh,
Penulis

Fadel Rizaldi

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Fadel Rizaldi
NIM : 180604147
Fakultas/Prodi : Pengaruh Kinerja Fiskal Terhadap Kemiskinan
Di Provinsi Aceh
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, S.E., M..Si.
Pembimbing II : Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.I., M.Sc.

Kemiskinan merupakan fenomena yang sudah terjadi sejak lama sepanjang peradaban manusia. Kemiskinan terus menjadi problematika dari masa kemasa, dan dapat dikatakan sebagai masalah yang paling mendasar, sehingga perlu menjadi bagian yang di perhatikan lebih oleh pemerintah di negara maupun daerah manapun. Upaya pemerintah mengurangi kemiskinan tidak terlepas dari berbagai kebijakan, baik ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh selama 8 tahun terakhir dari 2016-2023. Dari hasil penelitian *Random Effect Model* terpilih sebagai model terbaik. Hasil penelitian secara parsial menunjukan Pendapatan Asli daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan sedangkan Dana alokasi Umum dan Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Pemerintah harus memberikan perhatian dalam meningkatkan fasilitas kepada masyarakat baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Dengan terpenuhi dan tercukupi semua kebutuhan bertujuan agar masyarakat dapat memiliki kehidupan yang baik dan layak.

Kata kunci : Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto Dan Kemiskinan

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK.....	xii
DAFTARISI	x
DAFTARTABEL	xii
DAFTARGAMBAR.....	xii

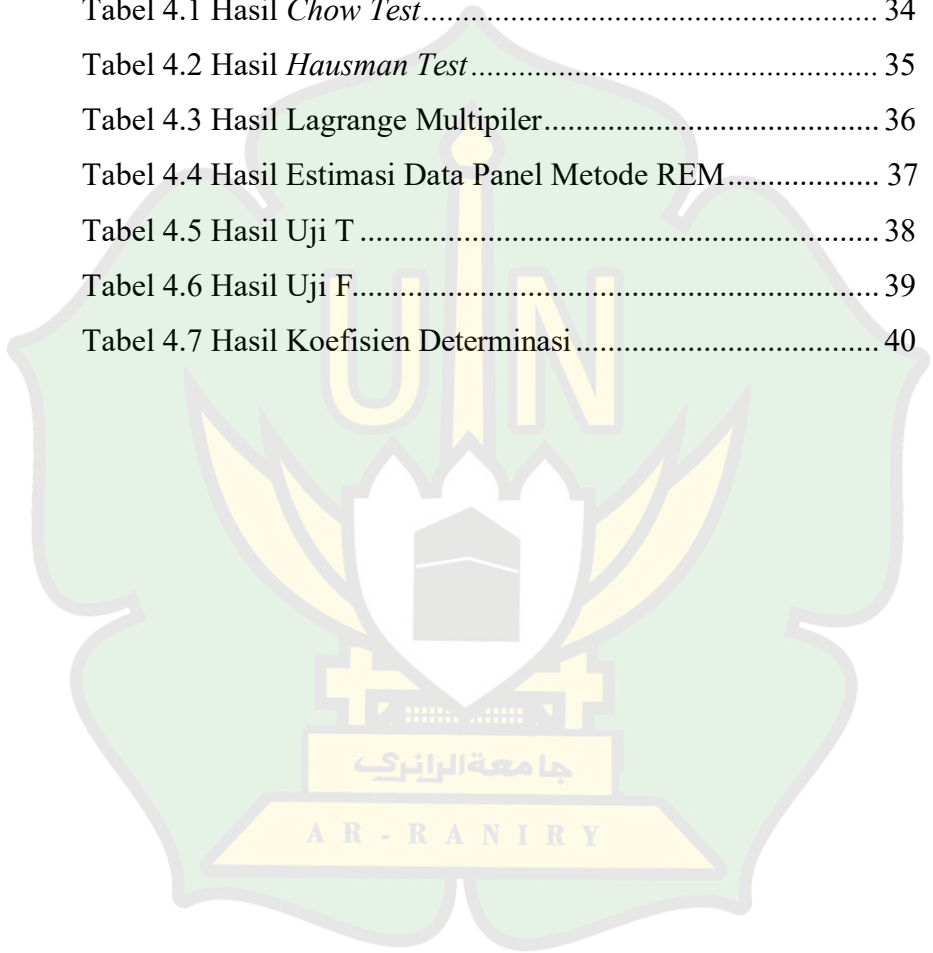
i

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Pengertian Kemiskinan.....	15
2.2 Pengertian Otonomi Daerah.....	21
2.2.1. Pengertian Desentralisasi	22
BAB III METODELOGI PENELITIAN	37
2.2.2. Pengertian Desentralisasi Fiskal.....	23
2.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	24
2.4 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU).....	27
2.5 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	29
2.6 Hubungan Antar Variabel Penelitian.....	30
2.6.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan	30
2.6.2. Pengaruh PAD Terhadap Kemiskinan	31
2.6.3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan	32
2.7 Penelitian Terkait	33
2.8 Kerangka Berpikir.....	35
2.9 Hipotesis.....	35
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Jenis dan Sumber Data	37
3.3 Definisi Operasional Variabel	38
3.4 Metode dan Teknik Analisis Data	39
3.4.1. Model Estimasi Regresi Data Panel	40
3.4.2. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel	42
3.5 Pengujian Hipotesis.....	44

3.5.1. Hipotesis Parsial (Uji T).....	44
3.5.2. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)	45
3.6 Estimasi R^2	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.2 Analisis Deskriptif.....	49
4.2.1. Kemiskinan	49
4.2.2. Pendapatan Asli Daerah	51
4.2.3. Dana Alokasi Umum.....	53
4.2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	55
4.3 Estimasi Regresi Data Panel.....	57
4.3.1 Chow Test	57
4.3.2 Hausman Test.....	58
4.4 Model Regresi Panel Fixed Effect Model (FEM)	59
4.5 Pengujian Hipotesis.....	62
4.5.1. Uji Hipotesis Parsial (Uji T)	62
4.5.2. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)	63
4.6 Estimasi R^2	64
4.7 Pembahasan	65
4.7.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan.....	65
4.7.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan.....	67
4.7.3. Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan	68
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Variabel Operasional	23
Tabel 4.1 Hasil <i>Chow Test</i>	34
Tabel 4.2 Hasil <i>Hausman Test</i>	35
Tabel 4.3 Hasil Lagrange Multipiler.....	36
Tabel 4.4 Hasil Estimasi Data Panel Metode REM.....	37
Tabel 4.5 Hasil Uji T	38
Tabel 4.6 Hasil Uji F.....	39
Tabel 4.7 Hasil Koefisien Determinasi	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Aceh Tahun 2017-2021	2
Gambar 1.2 Jumlah Dana Alokasi Umum Provinsi Aceh.....	4
Gambar 1.3 Pendaootan Asli Daerah Aceh 2018-2023	5
Gambar 1.4 PDRB Provinsi Aceh 2018-2023	6
Gambar 2.5 Kerangka Berpikir.....	21
Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Aceh	29
Gambar 4.2 Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Aceh 2016-2023	30
Gambar 4.3 Rata-Rata Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Tahun 2016-2023	31
Gambar 4.4 Rata-Rata Dana Alokasi Umum Provinsi Aceh Tahun 2016-2023	32
Gambar 4.5 Rata-PDRB Provinsi Aceh Tahun 2016-2023	33

BAB I

PENDAHULUAN

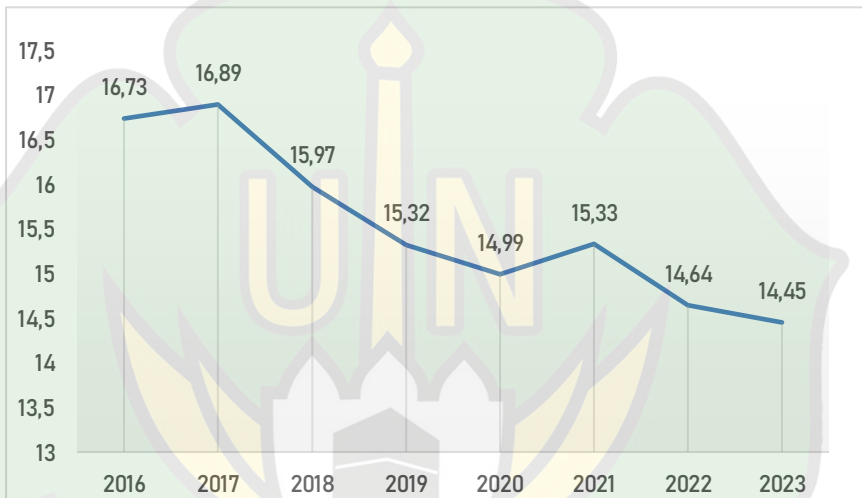
1.1 Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah manusia, kemiskinan telah menjadi masalah yang selalu ada. Kemiskinan terus menjadi problematika dari masa kemasa, dan dapat dikatakan sebagai masalah yang paling mendasar, sehingga perlu menjadi bagian yang di perhatikan lebih oleh pemerintah di negara maupun daerah manapun. Banyak langkah ekonomi makro dan ekonomi mikro yang saling bergantung dalam upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan. Kebijakan pemerintah di tingkat ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga melalui regulasi perdagangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan memperbaiki infrastruktur di wilayah-wilayah yang ekonominya terpuruk. Namun, di tingkat ekonomi mikro, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan menerima bantuan langsung dari pemerintah dalam bentuk kupon makanan, subsidi tunai, atau asuransi kesehatan. Pendekatan ini merupakan implementasi dari kebijakan anggaran pro-kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan (Sigit & Kosasih, 2020).

Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Sumatera. Pada September 2020, jumlah penduduk miskin di Aceh meningkat sebanyak 19 ribu

orang. Hal ini berdasarkan laporan dari Detik Finance pada tanggal 15 Februari 2021 menyatakan Persentase kemiskinan di Aceh mencapai 15,43%, yang merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera. (Detik Finance, 2021).

Gambar 1.1
Persentase Penduduk Miskin di Aceh Tahun 2016-2023



Sumber : Badan Pusat statistik (BPS, 2023), Data Diolah

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 8 tahun, catatan dari BPS penduduk miskin di Aceh persentase penduduk miskin yang ada di provinsi Aceh paling tinggi terjadi pada tahun 2017 dengan angka 16,89% menunjukkan adanya peningkatan 0,16% dari tahun sebelumnya. Sedangkan persentase penduduk miskin di Aceh paling rendah terjadi pada tahun 2023 dengan angka 14,45% angka yang terus menurun dari tahun 2021, yang menandakan adanya kemajuan dari sumber daya manusia yang ada di provinsi Aceh.

Menurut *World Bank* (2004), Pendapatan rendah dan aset yang tidak memadai menyebabkan kemiskinan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar termasuk makanan, perumahan, pakaian, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Faktor-faktor pemicu kemiskinan meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, dan kontrol terhadap konsumsi. Penting untuk melakukan pengukuran dan pemahaman terhadap penyebab kemiskinan agar dapat mengambil kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah ini dan memberikan perhatian khusus kepada kondisi hidup masyarakat miskin.

Selain itu kemiskinan juga berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan melalui pajak daerah itu sendiri, Oleh karena itu, kebijakan fiskal menjadi salah satu penanda utama pertumbuhan ekonomi regional. Kebijakan fiskal yang dihasilkan dari prinsip anggaran berimbang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan kestabilan ekonomi yang terjaga, pemerintah dapat merencanakan dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan secara efektif. Selain itu, upaya pemerintah dalam mendorong tabungan masyarakat dan menciptakan lembaga keuangan yang sehat juga dapat memberikan akses lebih besar kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan keuangan mereka sendiri, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap sumber dana modal dan layanan keuangan (Wijaya, 2019).

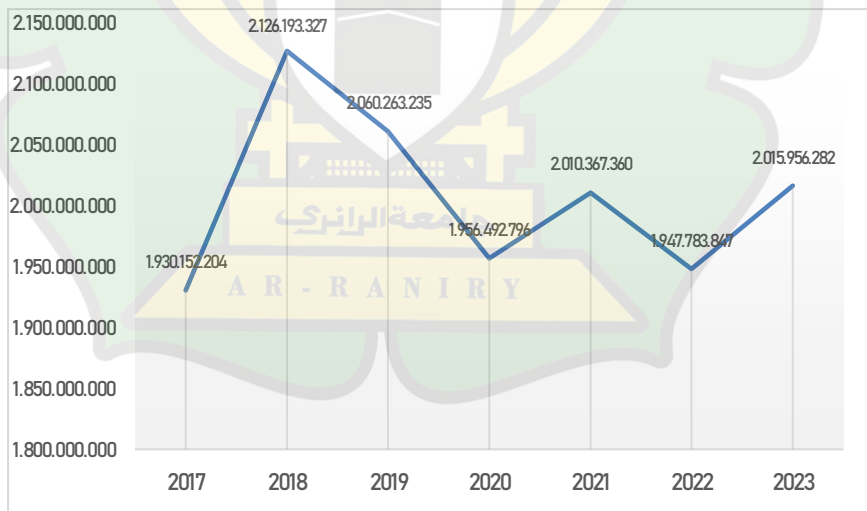
Desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah menyediakan fasilitas publik yang layak, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan lapangan kerja. APBD (Anggaran Pendapatan Asli Daerah) memainkan peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan menyediakan dana untuk program pelayanan masyarakat dan keuangan daerah lainnya. Pada era desentralisasi fiskal, peran APBD semakin kuat karena kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kinerja daerahnya menjadi lebih terlihat oleh masyarakat (Amami, 2022). Keseimbangan kekuatan antara peningkatan pendapatan, kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi. Oleh karenanya pemerintah melakukan desentralisasi fiskal untuk mengurangi ketergantungan fiskal tersebut.

Kebijakan fiskal pemerintah merupakan instrumen yang ampuh untuk memperkuat kegiatan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini terdapat beberapa indikator penting yang memiliki peran terhadap kondisi fiskal suatu daerah yaitu DAU (Dana Alokasi Umum), dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta faktor pendukung kebijakan fiskal secara tidak langsung seperti PDRB digunakan dalam penelitian ini. Meskipun PDRB bukan komponen langsung dari kebijakan fiskal, namun PDRB merupakan factor pendukung dan tidak bisa lepas dari kebijakan fiskal serta dapat memberikan informasi yang penting untuk merancang kebijakan fiskal. ketiga indikator inilah yang nanti nya

menjadi tolak ukur dalam menilai bagaimana kondisi fiskal suatu daerah yang akan dibahas dalam penelitian ini. (Nurhayana, 2023).

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2019 –2023 sumber dana yang diterima Provinsi Aceh dilihat dari dana alokasi umum mengalami penurunan dan kenaikan signifikan pada tahun 2023. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, tujuan Dana Alokasi Umum yang dibiayai dari pendapatan APBN adalah untuk mendukung kebutuhan daerah dan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dalam rangka desentralisasi. Berikut ini adalah bagan porsi Provinsi Aceh dalam keseluruhan alokasi anggaran:

Gambar 1.2
Perkembangan Dana Alokasi Umum Provinsi Aceh



Sumber : Badan Pusat statistik (BPS, 2024), Data Diolah

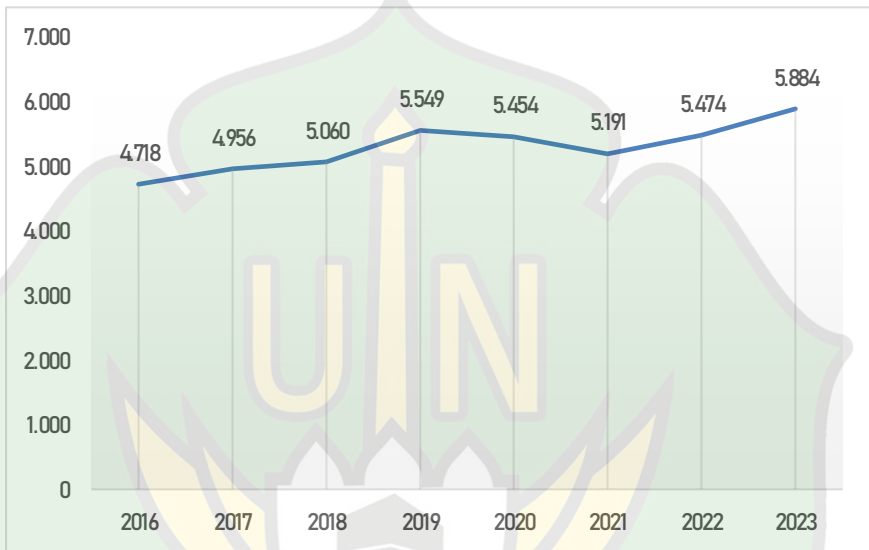
Dana alokasi umum dikerahkan pemerintah sebagai sarana peningkatan pelayanan publik atau mencapai tujuan desentralisasi

meningkat signifikan pada tahun 2023. Dengan adanya dana transfer yang diberikan diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Aceh. Panggabean (2022) menyatakan dana alokasi umum dapat berpengaruh terhadap kemiskinan karena dapat mendukung berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Melalui DAU, pemerintah daerah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik, mengembangkan infrastruktur yang memadai, mendukung program kesejahteraan sosial, serta menggalakkan pembangunan ekonomi lokal untuk mengentaskan kemiskinan.

Pemerintah membantu masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai cara, salah satunya adalah Pendapatan dan Belanja Daerah. Pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengentasan kemiskinan dapat dicapai melalui pelaksanaan APBD. PAD atau Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah dalam hal ini. Istilah "PAD" didefinisikan oleh Nasir (2019) sebagai pendapatan daerah yang diperoleh di dalam daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Sebagai salah satu indikator berjalannya otonomi daerah yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan PAD (Arini,

2015). Berikut ini adalah gambaran visual pendapatan asli daerah Provinsi Aceh:

Gambar 1.3
Pendapatan Asli Daerah Aceh 2016-2023



Sumber : Badan Pusat statistik (BPS, 2024), Data Diolah

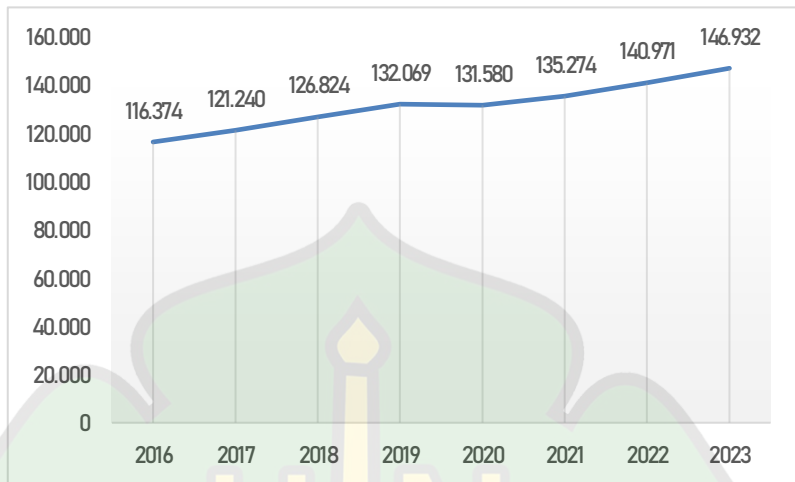
Berdasarkan gambar diatas Pendapatan Asli daerah Aceh dalam kurun waktu 8 tahun setiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi terlihat pada tahun 2019 terus meningkat sampai menyentuh angka 5.549 Milyar. Pada tahun 2020 sampai 2021 pendapatan asli daerah provinsi Aceh mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan oleh banyaknya factor salah satunya adalah covid-19 yang sangat-sangat berdampak terhadap pendapatn asli daerah Aceh. Pada tahun 2022 sampai 2023 mengalami peningkatan yang signifikan itu dikarenakan sudah banyaknya dan sudah selesainya covid-19 yang menjadi kendala pendapatan asli

daerah di provinsi Aceh pada tahun sebelumnya mengalami penurunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tolok ukur kemampuan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Salah satu indikator kinerja pembangunan, peningkatan pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat adalah besarnya kontribusi PAD dalam APBD. Pembentukan daerah otonomi daerah didasarkan pada kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga sudah seharusnya masing-masing daerah mampu meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sering digunakan untuk mengukur situasi fiskal daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan oleh Sukirno (2006) sebagai jumlah seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu wilayah geografis tertentu, terlepas dari siapa yang memiliki komponen produksi yang mendasarinya (penduduk setempat atau orang luar). PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Namun demikian, peningkatan PDRB tersebut belum mampu mengentaskan kemiskinan secara signifikan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.4 :

Gambar 1.4
PDRB Provinsi Aceh 2016-2023



Sumber : Badan Pusat statistik (BPS, 2024), Data Diolah

Melihat laju pertumbuhan PDRB yang terus meningkat, hal ini tentu menjadi masalah. Penurunan pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2018 menjadi akar penyebab krisis. Karena keterkaitan antara hal ini dengan rencana anggaran tahun lalu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Aceh, pemotongan nilai anggaran tersebut berdampak pada pergeseran

angka kemiskinan yang tidak terduga (Alkindi, 2018).

Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap kemiskinan dilakukan oleh Nurhayana (2023) dengan judul Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kapasitas fiskal yang dilihat dari pajak daerah berpengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya penelitian dari Kawulur (2019) menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang diproseskan melalui PAD berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan I Made Anom Iswara, I Gusti Bagus Indrajaya (2014) melakukan penelitian serupa namun memiliki hasil Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan.

Oleh karena itu dari latar belakang masalah di atas menimbulkan pertanyaan mengenai Bagaimana efektifitas kinerja fiskal yang di berlakukan di provinsi aceh dan pengaruh nya terhadap kemiskinan, sesuai dengan pembahasan maka dari itu peneliti tertarik meneliti tentang “Pengaruh Kinerja Fiskal Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode Tahun 2016- 2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan menjadi problematika penting terhadap perekonomian setiap daerah, hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kondisi sosial ekonomi suatu daerah sekaligus menjadi bukti berhasil tidaknya kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pada daerah tersebut termasuk negara Indonesia. Kemiskinan sendiri secara tidak langsung terpengaruh dengan kebijakan dan kinerja fiskal dalam suatu daerah itu sendiri, Dari uraian yang telah dipaparkan di atas maka terdapat permasalahan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang dapat di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan kasus yang akan menjadi pembahasan dan hasil dari penelitian serta olah data yang dilakukan diharapkan penulis mendapatkan informasi mengenai kinerja fiskal dan bagaimana keterkaitan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja fiskal, dengan begitu dari penelitian ini kita akan mendapatkan informasi

serta jawaban dari olah kasus dan uji data mengenai beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh?
3. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh?

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa keuntungan penelitian ini yang telah diidentifikasi berdasarkan uraian penelitian terdahulu, definisi masalah, dan tujuan penelitian proposal ini:

1.4.1. Manfaat Akademis

- a. Khazanah keilmuan, yang memberikan kontribusi bagi pemahaman peneliti di bidang ini.
- b. Sumber untuk penelitian mendatang tentang topik yang sama atau yang sebanding; penelitian ini dapat menjadi referensi. Kinerja anggaran Provinsi Aceh dan tingkat kemiskinan adalah dua bidang yang disorot dalam penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah provinsi dan seluruh instansi yang bersangkutan agar dapat memanfaatkan

penelitian ini serta menjadi referensi dalam pertimbangan keputusan dan kebutuhan lainnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti mengorganisasikan pembahasan secara sistematis ke dalam tiga bab untuk memudahkan pemahaman isi proposal:

BAB I : PENDAHULUAN.

Dimulai dengan latar belakang dan konseptualisasi masalah, bab ini mungkin memberikan gambaran umum tentang penelitian yang sedang dilakukan, termasuk tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian, dan tujuan penelitian itu sendiri.

BAB II : LANDASAN TEORI.

Di dalam bab ini menjelaskan teori-teori yang tentang fiskal dan kemiskinan di Aceh.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.

Populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, dan prosedur analisis data semuanya dibahas dalam bab ini, bersama dengan bagaimana jenis studi ini digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, dapat ditemukan deskripsi objek penelitian, pemeriksaan data penelitian, dan pembahasan temuan dari pemeriksaan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi ringkasan semua temuan studi yang diperoleh dari analisis data, serta rekomendasi yang menguraikan tindakan yang perlu diikuti oleh pihak-pihak terkait.

